MUSYTARI

Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi

Vol 25 No 12 Tahun 2026

ISSN : 3025-9495

DILEMA ETIKA DALAM PRAKTIK EKONOMI ISLAM: ANTARA ORIENTASI PROFIT DAN KEMASLAHATAN

Intan Suri Mahardika[1],Aura Keisha Lovira Yasha[2*], Armel Firgiantama[3], Yesi Nurlela[4], Nia Mega Lestari[5], Herza Ardiansyah[6], Chandra Pratama Wijaya[7]

UIN Raden Intan Lampung[1-7]
Email: keisyasamsung2@gmai.com*

ABSTRACT

Islamic economics integrates economic rationality with ethical and religious values. However, Islamic economic practices still face an ethical dilemma between the pursuit of profit and the realization of public welfare (maslahah). This article aims to analyze the ethical dilemma in Islamic economic practices, particularly the relationship between profit orientation and maslahah, as well as the principles that should guide economic actors in resolving this dilemma. This study employs a qualitative literature review method using relevant scientific articles published primarily within the last five years. Data were collected through literature searches on Islamic business ethics, maqashid al-shariah, Islamic banking, Islamic entrepreneurship, and Sharia-compliant business practices. The data were analyzed through content analysis by identifying, comparing, and synthesizing the main arguments and findings from previous studies. The results indicate that profit is not rejected in Islamic economics because it is necessary for business sustainability and economic development. Nevertheless, profit cannot become the sole objective when its achievement causes injustice, deception, exploitation, environmental damage, or harm to society. The concept of maslahah therefore functions as an ethical and normative orientation that directs profit toward lawful, fair, sustainable, and socially beneficial economic activities. Islamic economic actors need to integrate profitability, Sharia compliance, social responsibility, and public welfare into their decision-making.

Keywords: Islamic economics, Islamic business ethics, maqashid al-shariah, maslahah, profit.

ABSTRAK

Ekonomi Islam mengintegrasikan rasionalitas ekonomi dengan nilai-nilai etika dan agama. Namun, praktik ekonomi Islam masih menghadapi dilema etika antara upaya memperoleh keuntungan (profit) dan mewujudkan kemaslahatan (maslahah) bagi masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis dilema etika dalam praktik ekonomi Islam, khususnya hubungan antara orientasi profit dan kemaslahatan, serta prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi pedoman pelaku ekonomi dalam menghadapi dilema tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui penelaahan artikel ilmiah

Article history

Received: November 2026

Reviewed: November 2026

Published: November 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

ISSN : 3025-9495

yang relevan, terutama publikasi lima tahun terakhir. Data diperoleh melalui penelusuran literatur mengenai etika bisnis Islam, maqashid al-shariah, perbankan syariah, kewirausahaan Islam, dan praktik bisnis berbasis syariah. Data dianalisis menggunakan analisis isi dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis gagasan serta hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam tidak menolak profit karena keuntungan diperlukan untuk keberlangsungan usaha dan perkembangan ekonomi. Namun, profit tidak dapat ditempatkan sebagai satu-satunya tujuan apabila pencapaiannya menimbulkan ketidakadilan, penipuan, eksploitasi, kerusakan lingkungan, atau kemudaratan bagi masyarakat. Konsep maslahah menjadi orientasi etis dan normatif yang mengarahkan pencapaian keuntungan agar tetap halal, adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sosial. Dengan demikian, pelaku ekonomi Islam perlu mengintegrasikan profitabilitas, kepatuhan syariah, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi.

Kata Kunci: ekonomi Islam, etika bisnis Islam, maqashid al-shariah, maslahah, profit.

1. Pendahuluan

Aktivitas ekonomi pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan manusia untuk memperoleh manfaat dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam praktik bisnis modern, profit sering kali menjadi salah satu indikator utama keberhasilan perusahaan. Keuntungan diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha, membiayai operasional, mengembangkan investasi, memberikan imbal hasil kepada pemilik modal, serta mempertahankan daya saing. Namun, orientasi profit yang tidak dibatasi oleh nilai etika dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti manipulasi informasi, eksploitasi tenaga kerja, ketidakadilan dalam transaksi, praktik monopoli, serta pengabaian terhadap dampak sosial dan lingkungan.(Jurnal et al., 2018)

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai berdasarkan keberhasilan memperoleh keuntungan secara material. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang harus dijalankan berdasarkan prinsip halal, keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kemanfaatan. Kajian mengenai etika bisnis Islam menunjukkan bahwa aktivitas bisnis dalam Islam tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga untuk menjalankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dan memperoleh keberkahan serta keridaan Allah.

Persoalan muncul ketika kepentingan memperoleh profit berhadapan dengan kepentingan masyarakat. Dalam kondisi tertentu, keputusan yang meningkatkan keuntungan perusahaan belum tentu menghasilkan kemaslahatan bagi konsumen, pekerja, masyarakat, maupun lingkungan. Sebaliknya, keputusan yang memberikan manfaat sosial dalam jangka pendek dapat

ISSN : 3025-9495

meningkatkan biaya operasional dan mengurangi keuntungan perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dilema etika yang perlu dianalisis berdasarkan prinsip ekonomi Islam.

Konsep *maqashid al-shariah* memberikan kerangka penting untuk memahami persoalan tersebut. Tujuan syariah tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga dengan terwujudnya kemanfaatan dan terlindunginya kepentingan manusia. Penelitian mengenai pengukuran kinerja bank syariah menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan adanya perbedaan antara pencapaian kinerja finansial dan kontribusi terhadap tujuan *maqashid al-shariah*. Dengan demikian, ukuran keberhasilan lembaga ekonomi syariah tidak cukup hanya menggunakan indikator profitabilitas.

Perkembangan ekonomi digital juga memperkuat urgensi persoalan etika. Penelitian (Husna et al., 2026) mengenai penerapan etika bisnis Islam pada pengguna Bukalapak di Yogyakarta menunjukkan pentingnya prinsip keamanan, privasi, tidak melakukan penipuan, kebenaran, tanggung jawab, keadilan, dan kebebasan dalam aktivitas perdagangan digital. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa praktik etis perlu diperkuat agar aktivitas ekonomi digital tidak hanya berorientasi pada transaksi dan keuntungan, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat.

Penelitian lain menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dapat berjalan beriringan dengan kinerja ekonomi. (Zaki, 2025), misalnya, menemukan bahwa implementasi syariah, akses pembiayaan syariah, dan kapasitas manajerial memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja pada UMKM yang diteliti. Temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai etika dan prinsip syariah tidak harus diposisikan sebagai penghambat keuntungan, tetapi dapat menjadi bagian dari strategi keberlanjutan dan daya saing usaha.

Dilema antara profit dan kemaslahatan dengan demikian tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan mutlak. Dalam ekonomi Islam, profit merupakan sesuatu yang diperbolehkan selama diperoleh melalui cara yang halal dan tidak bertentangan dengan kepentingan manusia. Persoalan etis muncul ketika profit ditempatkan sebagai tujuan tunggal sehingga mengesampingkan keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemanfaatan sosial.

Berdasarkan fenomena tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dilema etika dalam praktik ekonomi Islam antara orientasi profit dan kemaslahatan, mengidentifikasi bentuk-bentuk dilema etika yang dapat muncul dalam kegiatan ekonomi, serta merumuskan prinsip yang dapat digunakan untuk mencapai keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat. Kajian ini menggunakan perspektif etika bisnis Islam dan *maqashid al-shariah* sebagai landasan teoritis. Proposisi konseptual yang diajukan adalah bahwa orientasi

ISSN : 3025-9495

profit dalam ekonomi Islam dapat dibenarkan sepanjang pencapaiannya berada dalam batas syariah dan diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas.

2. Studi Literatur

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara profit, kepatuhan syariah, dan kemaslahatan telah menjadi perhatian dalam kajian ekonomi Islam. (Novika et al., n.d.) melakukan penelitian mengenai pengukuran kinerja bank syariah menggunakan *Maqashid Index* serta *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengukuran berdasarkan profitabilitas dan pengukuran berdasarkan *maqashid* dapat menghasilkan gambaran yang berbeda mengenai kinerja lembaga keuangan syariah. Beberapa bank dapat memiliki tingkat kepatuhan syariah dan kinerja finansial yang baik, tetapi masih memiliki kesenjangan pada aspek pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kinerja ekonomi Islam perlu dilihat secara multidimensional.

(Nomor, 2025) meneliti penerapan etika bisnis Islam pada *online marketplace* dengan objek pengguna Bukalapak di Yogyakarta. Penelitian menggunakan 665 responden dan menemukan bahwa prinsip kebenaran, tanggung jawab, kebebasan, keamanan, privasi, dan tidak melakukan penipuan merupakan dimensi penting dalam penerapan etika bisnis Islam di perdagangan digital. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan etika masih perlu diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan pengguna.

Penelitian (Ilmiah et al., 2025) mengenai etika bisnis Islam pada toko busana Muslim di Thailand menunjukkan bahwa penerapan prinsip etika Islam dapat menjadi bagian dari strategi bisnis dan membangun kepercayaan masyarakat. Studi tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap nilai-nilai moral Islam tidak harus dipandang berlawanan dengan keberhasilan komersial. Bahkan, praktik etis dapat menjadi keunggulan bagi pelaku usaha dalam membangun hubungan dengan konsumen dan komunitas.

(Maulida, 2024) meneliti pengaruh implementasi syariah, akses pembiayaan syariah, dan kapasitas manajerial terhadap kinerja UMKM di Kota Medan. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi syariah, akses pembiayaan syariah, dan kapasitas manajerial berpengaruh positif terhadap pendapatan dan pertumbuhan lapangan kerja. Temuan kualitatif juga menunjukkan bahwa tata kelola yang etis dan literasi keuangan dapat meningkatkan inovasi, ketahanan usaha, dan kepercayaan pemangku kepentingan.

(Rayyahun, 2025) juga mengkaji kinerja keuangan UMKM halal dengan menekankan pentingnya modal intelektual dan keberlanjutan usaha. Penelitian tersebut menunjukkan

ISSN : 3025-9495

bahwa sertifikasi halal saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan finansial usaha. Pengembangan sumber daya dan keberlanjutan bisnis tetap diperlukan untuk menghasilkan kinerja yang baik.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu telah membahas etika bisnis Islam, kinerja keuangan, penerapan syariah, serta *maqashid al-shariah* secara terpisah maupun bersamaan. Namun, masih terdapat ruang untuk mengkaji secara konseptual bagaimana pelaku ekonomi Islam menghadapi dilema ketika kepentingan memperoleh profit berhadapan dengan tuntutan kemaslahatan. Artikel ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan menempatkan profit dan *maslahah* bukan sebagai dua tujuan yang harus dipertentangkan, melainkan sebagai dua dimensi yang perlu diintegrasikan dalam praktik ekonomi Islam.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). Metode tersebut dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis gagasan, konsep, dan hasil penelitian terdahulu mengenai dilema etika dalam ekonomi Islam, bukan mengukur hubungan antarvariabel melalui survei lapangan.

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang berasal dari artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema ekonomi Islam, etika bisnis Islam, *maqashid al-shariah*, *maslahah*, profitabilitas, keberlanjutan usaha, dan kepatuhan syariah. Literatur terutama dipilih dari artikel yang diterbitkan dalam rentang lima tahun terakhir agar pembahasan didasarkan pada perkembangan penelitian mutakhir. Beberapa penelitian yang digunakan antara lain penelitian (Rayyahun, 2025), (E. Syariah et al., 2026)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran artikel pada laman jurnal ilmiah yang menyediakan akses terhadap artikel dan *full text*. Artikel yang dipilih kemudian dibaca dan diklasifikasikan berdasarkan tema, yaitu orientasi profit, etika bisnis Islam, *maqashid al-shariah*, kemaslahatan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*). Tahap analisis dilakukan melalui empat langkah, yaitu: (1) mengidentifikasi literatur yang relevan; (2) mengelompokkan gagasan dan temuan berdasarkan tema; (3) membandingkan hasil penelitian terdahulu; dan (4) melakukan sintesis untuk memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara profit dan kemaslahatan dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan metode tersebut, artikel ini tidak menghasilkan data statistik primer, tetapi menghasilkan sintesis konseptual berdasarkan literatur yang dianalisis.

ISSN : 3025-9495

4. HASIL

Hasil kajian menunjukkan bahwa profit dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam pada dasarnya tidak berada dalam posisi yang saling meniadakan. Profit merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi karena memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan produksi, perdagangan, investasi, dan inovasi. Usaha yang tidak menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan akan mengalami kesulitan mempertahankan kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, memperoleh keuntungan yang halal merupakan sesuatu yang dapat diterima dalam ekonomi Islam.

Namun, profit dalam ekonomi Islam memiliki batas etis. Keuntungan harus diperoleh melalui kegiatan yang halal, tidak mengandung riba, gharar yang dilarang, maysir, penipuan, manipulasi, maupun tindakan yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, ukuran keberhasilan ekonomi Islam tidak berhenti pada jumlah keuntungan yang diperoleh, tetapi juga mempertimbangkan proses memperoleh keuntungan dan dampak yang ditimbulkannya.

Kajian terhadap penelitian tentang bank syariah memperlihatkan bahwa profitabilitas dan pencapaian *maqashid al-shariah* merupakan dimensi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Penelitian Asmar et al. (2023) menunjukkan bahwa pengukuran kinerja menggunakan *Maqashid Index* dapat mengungkap dimensi pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan yang tidak selalu terlihat apabila kinerja hanya diukur melalui indikator finansial.

Pada aktivitas perdagangan digital, dilema etika juga muncul melalui persoalan transparansi, keamanan, privasi, dan penipuan. Penelitian (Rayyahun, 2025) menunjukkan bahwa prinsip etika Islam memiliki relevansi dengan perdagangan digital, khususnya melalui penerapan kebenaran, tanggung jawab, kebebasan, keamanan, privasi, dan praktik tidak menipu.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa penerapan nilai syariah dapat mendukung keberlanjutan ekonomi. Penelitian (P. E. Syariah, 2018) memperlihatkan bahwa implementasi syariah bersama akses pembiayaan dan kapasitas manajerial dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan pertumbuhan lapangan kerja. Hal tersebut memperkuat argumentasi bahwa orientasi etika dan orientasi ekonomi tidak selalu bertentangan.

Dengan demikian, dilema etika dalam ekonomi Islam dapat diringkas ke dalam tiga kondisi utama. Pertama, ketika peningkatan profit diperoleh melalui praktik yang merugikan pihak lain. Kedua, ketika pelaku ekonomi hanya menggunakan ukuran finansial dan mengabaikan dampak sosial serta lingkungan. Ketiga, ketika tanggung jawab sosial dipisahkan dari strategi ekonomi sehingga kemaslahatan dianggap sebagai beban tambahan, bukan bagian dari tujuan ekonomi Islam.

ISSN : 3025-9495

5. Pembahasan

Dilema antara orientasi profit dan kemaslahatan merupakan salah satu persoalan penting dalam praktik ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi yang berorientasi pasar, profit diperlukan sebagai mekanisme yang mendorong pelaku usaha untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Profit juga berfungsi sebagai sumber pembiayaan untuk ekspansi usaha, inovasi, pembayaran tenaga kerja, pengembangan teknologi, peningkatan kualitas produk, serta menjaga keberlangsungan perusahaan. Karena itu, Islam tidak mengajarkan bahwa keuntungan merupakan sesuatu yang harus ditinggalkan. Memperoleh keuntungan melalui kegiatan ekonomi yang halal merupakan bagian yang dibenarkan dalam Islam selama proses memperoleh keuntungan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya profit, melainkan pada bagaimana profit diperoleh, untuk apa profit digunakan, dan apakah proses pencapaiannya menimbulkan kemudaratan bagi pihak lain. Prinsip tersebut membedakan orientasi profit dalam ekonomi Islam dengan orientasi keuntungan yang semata-mata bersifat material. Dalam ekonomi konvensional, keberhasilan suatu perusahaan sering kali lebih banyak dilihat melalui indikator seperti tingkat keuntungan, pertumbuhan pendapatan, peningkatan aset, dan nilai perusahaan. Sementara itu, ekonomi Islam memberikan dimensi tambahan berupa pertimbangan halal-haram, keadilan, tanggung jawab sosial, amanah, dan kemanfaatan. Dengan demikian, keuntungan dalam Islam tidak hanya dinilai berdasarkan jumlahnya, tetapi juga berdasarkan cara memperolehnya dan dampaknya terhadap kehidupan manusia.

Dalam perspektif etika Islam, aktivitas bisnis merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kedudukan tersebut mengandung konsekuensi bahwa manusia tidak bebas menggunakan sumber daya secara tanpa batas, melainkan harus mempertanggungjawabkan penggunaannya. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus memperhatikan nilai amanah, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kebajikan. Pelaku ekonomi tidak hanya mempunyai tanggung jawab kepada pemilik modal, tetapi juga kepada konsumen, pekerja, mitra usaha, masyarakat, lingkungan, dan pada akhirnya kepada Allah Swt. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam mempunyai dimensi spiritual sekaligus sosial.

Konsep *maslahah* menjadi penting dalam menjembatani kepentingan profit dan kepentingan masyarakat. *Maslahah* mengandung gagasan mengenai tercapainya manfaat dan tercegahnya kemudaratan. Dalam konteks ekonomi, kemaslahatan dapat diwujudkan melalui penyediaan barang dan jasa yang bermanfaat, harga yang adil, perlindungan konsumen, upah yang layak, kesempatan kerja, distribusi kekayaan, pemberdayaan masyarakat, serta

ISSN : 3025-9495

perlindungan terhadap lingkungan. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak berhenti pada hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi memiliki dampak yang lebih luas terhadap struktur sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, keputusan bisnis tidak cukup dinilai dengan pertanyaan, “Berapa keuntungan yang diperoleh?” tetapi juga perlu dilengkapi dengan pertanyaan, “Apakah keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang halal?”, “Siapa yang memperoleh manfaat?”, “Apakah terdapat pihak yang dirugikan?”, “Apakah hak konsumen dan pekerja telah terpenuhi?”, serta “Apakah kegiatan tersebut memberikan manfaat yang berkelanjutan?” Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena aktivitas ekonomi dapat memberikan keuntungan secara finansial tetapi sekaligus menimbulkan dampak sosial yang negatif. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab moral.

a. Profit sebagai Tujuan yang Diperbolehkan

Profit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi. Pelaku usaha membutuhkan keuntungan agar dapat mempertahankan kegiatan operasional dan memenuhi tanggung jawabnya kepada pekerja, pemilik modal, pemasok, konsumen, dan pihak lain. Tanpa keuntungan yang memadai, suatu usaha akan mengalami kesulitan dalam membayar biaya produksi, mengembangkan usaha, melakukan inovasi, dan mempertahankan keberlangsungan kegiatan ekonominya.(Jurnal et al., 2018) Oleh sebab itu, memperoleh keuntungan bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Dalam konteks ekonomi Islam, keuntungan menjadi sah apabila diperoleh melalui transaksi yang halal dan memenuhi prinsip keadilan. Aktivitas produksi dan perdagangan harus dilakukan terhadap barang atau jasa yang diperbolehkan, dengan mekanisme transaksi yang jelas dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariah. Pelaku usaha juga harus menghindari tindakan yang merugikan pihak lain, seperti penipuan, manipulasi informasi, pengurangan timbangan, penyembunyian cacat barang, serta praktik lain yang mengandung ketidakjujuran.

Profit juga memiliki fungsi sosial apabila digunakan secara tepat. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat digunakan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja, mengembangkan produk yang bermanfaat, membayar kewajiban sosial, serta melakukan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, profit tidak selalu bertentangan dengan kemaslahatan. Sebaliknya, profit dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan apabila diperoleh dan dikelola dengan prinsip yang sesuai dengan syariah.

ISSN : 3025-9495

Penelitian mengenai UMKM syariah memperlihatkan bahwa implementasi prinsip syariah dapat berjalan bersama dengan peningkatan kinerja usaha. Hasibuan et al. (2025) menemukan bahwa implementasi syariah, pembiayaan berbasis syariah, dan kapasitas manajerial berhubungan positif dengan pendapatan serta penciptaan lapangan kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai etika tidak harus diposisikan sebagai penghambat produktivitas. Prinsip syariah justru dapat menjadi landasan bagi terciptanya tata kelola usaha yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.(Bisnis & Islam, 2024)

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesalahpahaman apabila prinsip etika dianggap sebagai sesuatu yang selalu membatasi perkembangan bisnis. Dalam jangka pendek, penerapan prinsip etika mungkin mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya tambahan, misalnya untuk meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kondisi kerja, memberikan perlindungan kepada konsumen, atau mengurangi dampak lingkungan. Namun, dalam jangka panjang, praktik tersebut dapat membangun kepercayaan, reputasi, loyalitas konsumen, dan keberlanjutan usaha.

Karena itu, problem etika bukanlah keberadaan profit, tetapi ketika profit menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Apabila keuntungan diperoleh melalui penipuan, eksploitasi, manipulasi harga, pengurangan kualitas secara tidak jujur, atau kerusakan lingkungan, maka pencapaian profit tersebut kehilangan legitimasi moral dalam perspektif Islam. Profit yang diperoleh dengan cara demikian tidak dapat dipisahkan dari proses yang melahirkannya. Oleh sebab itu, Islam tidak hanya mempertimbangkan hasil ekonomi, tetapi juga proses dan konsekuensi dari aktivitas ekonomi tersebut.(Martiwi et al., 2026)

Dengan demikian, orientasi profit yang sesuai dengan ekonomi Islam adalah orientasi profit yang bersifat halal, wajar, adil, dan bertanggung jawab. Pelaku usaha tetap dapat mengejar keuntungan, tetapi keuntungan tersebut harus berada dalam batas-batas syariah. Profit bukan tujuan yang harus ditolak, melainkan tujuan ekonomi yang harus diarahkan agar tidak mengorbankan kepentingan manusia dan masyarakat.

b. Kemaslahatan sebagai Orientasi Ekonomi

Kemaslahatan memberikan arah agar aktivitas ekonomi tidak hanya menciptakan keuntungan privat, tetapi juga memberikan manfaat sosial. Hal tersebut sejalan dengan pendekatan *maqashid al-shariah* yang melihat tujuan syariah dalam kaitannya dengan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan manusia. Dalam konteks ekonomi Islam, kegiatan bisnis idealnya memberikan manfaat kepada individu sekaligus memberikan kontribusi terhadap kehidupan sosial.

ISSN : 3025-9495

Konsep *maqashid al-shariah* memberikan kerangka untuk melihat keberhasilan ekonomi secara lebih luas. Aktivitas ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga dengan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perkembangan kajian kontemporer, tujuan tersebut dapat diterjemahkan ke dalam persoalan seperti perlindungan konsumen, keamanan produk, keadilan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan pekerja, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan.

Penelitian mengenai kinerja bank syariah dengan *Maqashid Index* memperlihatkan bahwa dimensi pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan perlu dipertimbangkan bersama dengan profitabilitas. Dengan kata lain, lembaga yang mengklaim sebagai lembaga syariah tidak cukup hanya menunjukkan kepatuhan terhadap aspek kontrak atau menghasilkan profit, tetapi juga perlu melihat kontribusinya terhadap tujuan sosial Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran kinerja lembaga ekonomi Islam perlu bersifat multidimensional.

Orientasi kemaslahatan juga dapat diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari. Produsen dapat mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang benar, tidak menyembunyikan cacat barang, dan menetapkan harga secara wajar. Konsumen memperoleh manfaat karena mendapatkan produk yang aman dan informasi yang transparan. Produsen juga mendapatkan manfaat melalui meningkatnya kepercayaan konsumen. Dengan demikian, kepentingan produsen dan konsumen dapat dipertemukan melalui prinsip etika.(Masdar et al., 2025)

Lembaga keuangan dapat mewujudkan kemaslahatan melalui pembiayaan yang bertanggung jawab. Pembiayaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada kemampuan menghasilkan pendapatan bagi lembaga keuangan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan nasabah, tujuan penggunaan dana, risiko pembiayaan, serta dampaknya terhadap kehidupan ekonomi nasabah. Dalam konteks ini, prinsip keadilan dan tanggung jawab menjadi sangat penting agar hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah tidak berubah menjadi hubungan yang eksploitatif.

Perusahaan juga dapat mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan pekerja, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan. Pekerja merupakan bagian penting dari kegiatan produksi sehingga hak-haknya perlu dihormati. Demikian pula lingkungan merupakan sumber daya yang mendukung keberlangsungan kehidupan dan aktivitas ekonomi. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan demi keuntungan jangka pendek dapat mengurangi kemaslahatan masyarakat dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, kemaslahatan dapat dipahami sebagai orientasi yang memberikan batas sekaligus arah bagi pencapaian profit. Apabila suatu keputusan bisnis memberikan keuntungan

ISSN : 3025-9495

yang besar tetapi menimbulkan kerusakan dan kerugian yang lebih besar, keputusan tersebut perlu dievaluasi. Sebaliknya, keputusan yang mampu menghasilkan keuntungan secara wajar sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat lebih dekat dengan prinsip ekonomi Islam.

c. Bentuk Dilema Etika dalam Praktik Ekonomi Islam

Dilema etika dapat muncul ketika terdapat pilihan antara keputusan yang memberikan keuntungan lebih tinggi dengan keputusan yang memberikan manfaat sosial lebih besar. Dilema tersebut biasanya muncul ketika kepentingan beberapa pihak tidak sepenuhnya sama. Pemilik modal menginginkan keuntungan dan pertumbuhan usaha, pekerja menginginkan upah dan kondisi kerja yang layak, konsumen menginginkan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik, sedangkan masyarakat mengharapkan kegiatan usaha tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Misalnya, perusahaan dapat memperoleh profit lebih besar dengan menekan biaya tenaga kerja, tetapi keputusan tersebut dapat mengurangi kesejahteraan pekerja. Perusahaan juga dapat meningkatkan margin dengan menggunakan bahan baku yang lebih murah, tetapi kualitas produk dapat menurun. Dalam kondisi lain, perusahaan dapat memperoleh keuntungan jangka pendek melalui eksploitasi sumber daya alam, tetapi masyarakat akan menanggung dampak lingkungan dalam jangka panjang. Contoh tersebut menunjukkan bahwa keputusan yang menguntungkan satu pihak belum tentu menghasilkan kemaslahatan secara keseluruhan.(Sukti et al., n.d.)

Dalam ekonomi Islam, pilihan tersebut tidak seharusnya diselesaikan hanya dengan mempertimbangkan kepentingan pemilik modal. Prinsip keadilan dan tanggung jawab menuntut pelaku ekonomi memperhitungkan kepentingan para pemangku kepentingan. Pemilik usaha memang memiliki hak memperoleh keuntungan, tetapi hak tersebut tidak berarti memberikan kebebasan untuk mengabaikan hak pihak lain.

Dilema juga dapat muncul dalam penetapan harga. Pelaku usaha memiliki kepentingan untuk memperoleh margin keuntungan, sedangkan konsumen membutuhkan produk dengan harga yang terjangkau. Penetapan harga yang terlalu tinggi dapat membebani konsumen, terutama apabila produk tersebut berkaitan dengan kebutuhan dasar. Sebaliknya, harga yang terlalu rendah dapat membuat usaha tidak mampu mempertahankan keberlangsungan operasionalnya.(Zaki, 2025) Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara keuntungan yang wajar dan kemampuan konsumen.

Persoalan lain dapat muncul dalam pemasaran. Perusahaan memiliki kepentingan untuk meningkatkan penjualan melalui promosi, tetapi promosi harus tetap dilakukan secara jujur.

ISSN : 3025-9495

Penggunaan informasi yang dilebih-lebihkan, testimoni palsu, penyembunyian informasi penting, atau strategi yang sengaja memanfaatkan kelemahan konsumen dapat meningkatkan penjualan, tetapi bertentangan dengan prinsip etika Islam. Dalam konteks ini, keberhasilan pemasaran tidak dapat hanya diukur dari peningkatan transaksi, tetapi juga dari cara transaksi tersebut diperoleh.

Pada perdagangan digital, pengumpulan data konsumen dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan melalui pemasaran yang lebih efektif. Namun, penggunaan data tanpa transparansi dan perlindungan privasi dapat merugikan konsumen. Penelitian Ilham et al. (2024) menunjukkan bahwa keamanan, privasi, dan tidak melakukan penipuan merupakan bagian penting dalam penerapan etika bisnis Islam di *online marketplace*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak menghilangkan kebutuhan terhadap etika, tetapi justru menciptakan bentuk-bentuk persoalan etika baru.

Dilema juga dapat muncul dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan, sistem rekomendasi, dan pemasaran berbasis data. Perusahaan dapat menggunakan teknologi tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan. Namun, perusahaan tetap perlu mempertimbangkan transparansi, keamanan data, keadilan, serta kemungkinan terjadinya diskriminasi atau manipulasi konsumen. Prinsip ekonomi Islam dapat menjadi dasar untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tetap digunakan untuk kemanfaatan dan tidak menimbulkan kemudaratan.

Dengan demikian, dilema etika dalam ekonomi Islam pada dasarnya terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan antara kepentingan individu atau perusahaan dengan kepentingan masyarakat. Penyelesaian dilema tersebut membutuhkan pertimbangan yang lebih luas daripada sekadar perhitungan keuntungan. Pelaku ekonomi perlu mempertimbangkan hukum syariah, kepentingan pemangku kepentingan, tingkat manfaat dan mudarat, serta konsekuensi jangka panjang dari suatu keputusan.

d. Integrasi Profit dan Kemaslahatan

Profit dan kemaslahatan seharusnya tidak ditempatkan sebagai dua kutub yang selalu bertentangan. Keduanya dapat diintegrasikan melalui prinsip bisnis yang bertanggung jawab. Perusahaan yang menjaga kualitas, memberikan informasi yang benar, memperlakukan pekerja secara adil, memenuhi hak konsumen, dan membangun kepercayaan pada akhirnya dapat menciptakan keberlanjutan usaha.

Dalam perspektif ini, kemaslahatan tidak harus dipahami sebagai pengorbanan terhadap profit. Justru kemaslahatan dapat menjadi faktor yang mendukung keberlanjutan profit.

ISSN : 3025-9495

Konsumen yang merasa diperlakukan secara jujur dan adil cenderung memiliki kepercayaan terhadap perusahaan. Kepercayaan tersebut dapat membentuk hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumen. Demikian pula perlakuan yang baik terhadap pekerja dapat meningkatkan loyalitas, produktivitas, dan stabilitas organisasi.

Penelitian U-Mar et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam usaha busana Muslim dapat berhubungan dengan keberhasilan komersial dan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai moral dapat menjadi bagian dari strategi bisnis, bukan sekadar kewajiban normatif. Etika dapat menjadi sumber kepercayaan dan reputasi yang memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan.

Dalam kondisi persaingan yang semakin tinggi, reputasi menjadi salah satu aset penting bagi perusahaan. Perusahaan yang dikenal jujur, transparan, bertanggung jawab, dan konsisten terhadap prinsip yang dianut akan lebih mudah membangun kepercayaan. Sebaliknya, pelanggaran etika dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen dan menimbulkan kerugian dalam jangka panjang.(Maulida, 2024) Oleh karena itu, penerapan etika bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan agama, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi.

Hal yang sama terlihat dalam kajian mengenai UMKM halal. Siregar et al. (2025) menegaskan bahwa sertifikasi halal saja tidak cukup untuk menjamin kinerja finansial yang optimal. Usaha tetap membutuhkan modal intelektual dan keberlanjutan bisnis. Dengan demikian, kemaslahatan harus diterjemahkan ke dalam tata kelola, strategi, dan operasional perusahaan.(P. E. Syariah, 2018) Kepatuhan terhadap label halal perlu diikuti dengan pengelolaan usaha yang profesional, inovatif, transparan, dan bertanggung jawab.

Integrasi profit dan kemaslahatan juga dapat diwujudkan melalui konsep *shared value*, yaitu penciptaan nilai ekonomi yang berjalan bersamaan dengan penciptaan manfaat sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, pendekatan tersebut dapat dikembangkan dengan menempatkan prinsip *maslahah* sebagai dasar dalam menentukan produk, proses produksi, distribusi, pemasaran, dan penggunaan keuntungan. Dengan demikian, keberhasilan usaha tidak hanya dilihat dari besarnya keuntungan pemilik, tetapi juga dari nilai yang dihasilkan bagi masyarakat.

Perusahaan yang mengintegrasikan profit dan kemaslahatan dapat mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan bahan baku yang aman, menjaga standar kualitas, memperhatikan kondisi pekerja, mengurangi limbah, dan menyediakan produk dengan harga yang wajar. Meskipun beberapa langkah tersebut dapat membutuhkan biaya tambahan, manfaat jangka panjangnya dapat berupa peningkatan kepercayaan, loyalitas konsumen, dan

ISSN : 3025-9495

keberlanjutan perusahaan.

Dengan demikian, hubungan antara profit dan kemaslahatan bersifat komplementer. Profit menyediakan sumber daya untuk mempertahankan dan mengembangkan aktivitas ekonomi, sedangkan kemaslahatan memastikan bahwa perkembangan ekonomi tersebut tetap berada dalam jalur yang memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan. Integrasi keduanya merupakan salah satu karakter penting ekonomi Islam yang membedakannya dari orientasi ekonomi yang hanya menempatkan keuntungan material sebagai tujuan utama.

e. Prinsip Penyelesaian Dilema Etika

Dilema antara profit dan kemaslahatan dapat diselesaikan melalui beberapa prinsip dasar ekonomi dan etika Islam. Prinsip pertama adalah prinsip halal, yaitu setiap keuntungan harus diperoleh melalui kegiatan dan mekanisme yang dibenarkan syariah. Prinsip halal bukan hanya berkaitan dengan jenis barang atau jasa, tetapi juga menyangkut proses transaksi, sumber modal, mekanisme pembayaran, dan cara memperoleh keuntungan.(Masdar et al., 2025) Dengan demikian, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh rantai kegiatan ekonominya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Prinsip kedua adalah keadilan. Keadilan mengharuskan manfaat dan risiko kegiatan ekonomi tidak dibebankan secara tidak proporsional kepada pihak tertentu. Pemilik modal berhak mendapatkan keuntungan, tetapi pekerja juga memiliki hak memperoleh imbalan yang layak. Konsumen berhak memperoleh produk sesuai dengan informasi yang diberikan, sedangkan masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang tidak dirusak oleh kegiatan usaha.

Prinsip ketiga adalah kejujuran dan transparansi. Pelaku ekonomi harus memberikan informasi yang benar kepada konsumen dan mitra bisnis. Informasi mengenai kualitas produk, harga, risiko, ketentuan transaksi, dan karakteristik barang harus disampaikan secara jelas. Transparansi menjadi semakin penting dalam ekonomi digital karena konsumen sering kali tidak dapat melihat produk secara langsung dan sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh penjual.

Prinsip keempat adalah amanah dan tanggung jawab. Pelaku usaha harus memahami bahwa sumber daya yang dikelola merupakan amanah yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Amanah tidak hanya berarti memenuhi perjanjian dengan konsumen atau mitra bisnis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan perusahaan. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, pekerja yang dipekerjakan, konsumen yang dilayani, dan lingkungan yang digunakan sebagai sumber kegiatan ekonomi.

Prinsip kelima adalah keberlanjutan. Keuntungan tidak boleh dicapai melalui kerusakan

ISSN : 3025-9495

sumber daya yang mengurangi kesejahteraan generasi berikutnya. Prinsip keberlanjutan menuntut pelaku usaha mempertimbangkan penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, konsumsi energi, dan dampak lingkungan dari kegiatan produksi dan distribusi. Dalam perspektif Islam, keberlanjutan menjadi bagian dari tanggung jawab manusia dalam mengelola bumi.

Prinsip keenam adalah menghindari kemudaratan. Setiap keputusan bisnis seharusnya dianalisis berdasarkan potensi manfaat dan mudaratnya. Apabila suatu keputusan memberikan keuntungan yang besar tetapi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, maka keputusan tersebut perlu ditinjau kembali. Prinsip ini mendorong pelaku ekonomi untuk tidak hanya berpikir dalam perspektif keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.

Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan kajian ekonomi Islam yang semakin menekankan tata kelola etis dan keberlanjutan. Penelitian Andriansyah et al. (2025), misalnya, menempatkan tata kelola etis, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian penting dalam kerangka ekonomi Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik ekonomi Islam kontemporer perlu mengembangkan tata kelola yang mampu mengintegrasikan nilai agama dengan tuntutan profesionalisme dan keberlanjutan.

Dalam penerapannya, pelaku ekonomi Islam seharusnya mengembangkan model pengambilan keputusan yang mempertimbangkan tiga dimensi sekaligus, yaitu kelayakan ekonomi, kepatuhan syariah, dan dampak kemaslahatan. Kelayakan ekonomi diperlukan agar usaha tetap dapat bertahan dan berkembang. Kepatuhan syariah diperlukan agar proses dan hasil kegiatan ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sementara itu, pertimbangan kemaslahatan diperlukan agar kegiatan ekonomi memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian sosial.

Ketiga dimensi tersebut dapat digunakan sebagai kerangka sederhana dalam mengambil keputusan bisnis. Sebelum menjalankan suatu kegiatan, pelaku usaha perlu menilai apakah kegiatan tersebut layak secara ekonomi. Setelah itu, perlu diperiksa apakah mekanisme yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, perlu dianalisis dampaknya terhadap konsumen, pekerja, masyarakat, dan lingkungan. Jika suatu keputusan menghasilkan profit tetapi tidak memenuhi prinsip halal dan keadilan, maka keputusan tersebut tidak dapat dianggap sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Sebaliknya, keputusan yang memenuhi prinsip syariah tetapi tidak memiliki kelayakan ekonomi juga perlu dikaji kembali karena kegiatan ekonomi membutuhkan keberlanjutan finansial.(Martiwi et al., 2026) Oleh sebab itu, keseimbangan menjadi penting. Islam tidak

ISSN : 3025-9495

menghendaki kegiatan ekonomi yang sepenuhnya mengabaikan keuntungan, tetapi juga tidak membenarkan kegiatan ekonomi yang mengorbankan nilai moral demi keuntungan.

Dengan demikian, penyelesaian dilema etika dalam ekonomi Islam membutuhkan perubahan cara pandang terhadap profit. Profit seharusnya diposisikan sebagai sarana untuk mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi dan penciptaan kemaslahatan, bukan sebagai tujuan tunggal yang menghalalkan segala cara. Ketika profit diperoleh melalui proses yang halal dan dikelola secara bertanggung jawab, keuntungan tersebut dapat menjadi sumber daya untuk menciptakan manfaat yang lebih luas.

Pada akhirnya, praktik ekonomi Islam yang ideal adalah praktik yang mampu mempertemukan kepentingan individu, perusahaan, dan masyarakat. Pelaku usaha tetap memiliki hak untuk memperoleh keuntungan, tetapi hak tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka tanggung jawab. Konsumen harus mendapatkan perlindungan, pekerja harus memperoleh perlakuan yang adil, masyarakat harus memperoleh manfaat, dan lingkungan harus dijaga keberlanjutannya. Dengan pendekatan tersebut, aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan nilai finansial, tetapi juga nilai sosial dan moral.

Oleh karena itu, ukuran keberhasilan ekonomi Islam sebaiknya tidak hanya dilihat dari seberapa besar profit yang dihasilkan, tetapi juga dari bagaimana profit diperoleh, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan sejauh mana kegiatan tersebut berkontribusi terhadap kemaslahatan. Perspektif inilah yang menjadikan ekonomi Islam memiliki karakter yang lebih luas karena menggabungkan dimensi material, moral, sosial, dan spiritual dalam aktivitas ekonomi.

6. KESIMPULAN

Dilema etika antara orientasi profit dan kemaslahatan merupakan persoalan penting dalam praktik ekonomi Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak pencapaian keuntungan karena profit diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha, investasi, inovasi, dan perkembangan ekonomi. Namun, profit tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan karena kegiatan ekonomi juga harus memperhatikan prinsip halal, keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

Konsep *maqashid al-shariah* dan *maslahah* memberikan kerangka untuk menilai apakah pencapaian keuntungan benar-benar sejalan dengan tujuan ekonomi Islam. Keuntungan yang diperoleh melalui penipuan, eksploitasi, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, atau tindakan yang merugikan masyarakat tidak dapat dibenarkan hanya karena menghasilkan profit.

Dengan demikian, hubungan antara profit dan kemaslahatan seharusnya dipahami sebagai

hubungan yang saling melengkapi. Profit memberikan keberlanjutan ekonomi, sedangkan kemaslahatan memberikan arah moral dan sosial terhadap penggunaan sumber daya ekonomi. Integrasi keduanya dapat menghasilkan praktik ekonomi yang tidak hanya profitable, tetapi juga halal, adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaku ekonomi Islam perlu menggunakan indikator keberhasilan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kinerja finansial sekaligus kepatuhan syariah dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

Bisnis, E., & Islam, P. (2024). Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, *1*(1), 24–37.

Husna, D. Z., Lestari, F. S., & Lubis, N. A. (2026). *Rasionalitas Islam dalam Perspektif Ekonomi : antara Moralitas dan Efisiensi*. *08*(1), 53–62.

Ilmiah, J., Jurusan, M., Ekonomi, H., & Volume, S. (2025). PRINSIP ETIKA BISNIS DALAM ISLAM. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, *6*, 285–294.

Jurnal, P., Ekonomi, K., Jurnal, P., Ekonomi, K., & Perbankan, D. A. N. (2018). ETIKA DAN BISNIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*, *2*(1), 1–18.

Martiwi, D., Putri, N. M., Sadili, M. Z., Muttakin, R. R., Rahayuningsih, N., Saepulloh, A., Siliwangi, U., & Barat, J. (2026). ETIKA BISNIS ISLAM SEBAGAI LANDASAN MEWUJUDKAN. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, *4*(3).

Masdar, R., Iska, S., & Hidayati, A. (2025). Etika Produksi dalam Ekonomi Islam sebagai Penentu Keberlanjutan Bisnis Modern. *Department of Digital Business Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, *4*(4), 7256–7263.

Maulida. (2024). ETIKA BISNIS ISLAM: IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM EKONOMI SYARIAH. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *6*, 49–61.

Nomor, V. (2025). ETIKA PRODUKSI ISLAMI BERBASIS MAQASHID AL-SHARIAH: PILAR KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, *3*(1). https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1220

Novika, A., Aziz, A., & Pratama, N. (n.d.). PROBLEMATIKA PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM BISNIS. *Jebi*, *6*(September 2026), 198–210.

Rayyahun, A. (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Konteks Ekonomi Indonesia. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, *11*(1), 46–53.

Sukti, S., Syariah, P. E., Sosial, K., Halal, K., & Sosial, J. (n.d.). *Etika Produksi dalam Islam :*

ISSN : 3025-9495

Menjaga Keseimbangan Antara Profit dan Keadilan Sosial. 42–58.

Syariah, E., Praktik, T., & Profit, E. (2026). BATAS ETIS KEUNTUNGAN DALAM BISNIS SYARIAH: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK EXCESSIVE PROFIT. *ICHES: International Conference on Humanity Education and Social*, *5*.

Syariah, P. E. (2018). Etika Bisnis Islam : Konstruksi Nilai Keseimbangan Dan Kemanusiaan. *Al-Amwal*, *10*(2), 229–244. https://doi.org/10.24235/amwal.v

Zaki, M. (2025). Spiritual Entrepreneurship : Menemukan Kembali Etos Bisnis Nabi dalam Ekonomi Modern. *Journal of Economics and Islamic Business*, *1*(1), 17–30. https://doi.org/10.65802/mukhtasab.v1i1.74